

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul serta potensi yang dimiliki desa. Kewenangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi juga mencakup pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Salah satu instrumen yang dibentuk untuk mendukung pengembangan ekonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa dalam mengelola potensi lokal secara produktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, BUMDes dituntut memiliki tata kelola organisasi yang efektif agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi desa secara optimal.

Salah satu potensi ekonomi desa yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM tidak hanya berperan sebagai penyerap tenaga kerja dan penggerak ekonomi lokal, tetapi juga menjadi pendukung utama dalam pengembangan desa wisata melalui penyediaan produk kuliner, kerajinan, serta berbagai produk unggulan masyarakat. Keberadaan UMKM yang dikelola secara baik akan memberikan nilai tambah terhadap daya tarik wisata sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Oleh karena itu, pengelolaan UMKM memerlukan dukungan kelembagaan yang mampu mengoordinasikan berbagai kegiatan secara efektif melalui BUMDes sebagai lembaga pengelola ekonomi desa.

Efektivitas pengelolaan BUMDes sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembagian tugas, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan program secara terarah. Organisasi yang memiliki struktur yang jelas akan mampu menciptakan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang seimbang sehingga setiap aktor dapat melaksanakan perannya secara optimal. Sebaliknya, organisasi yang belum memiliki struktur yang jelas berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi, serta rendahnya efektivitas dalam pengelolaan program pemberdayaan masyarakat, termasuk pengelolaan UMKM di kawasan desa wisata.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas organisasi adalah melalui restrukturisasi organisasi. Restrukturisasi organisasi merupakan proses penataan kembali struktur organisasi, pembagian tugas, kewenangan, serta mekanisme koordinasi agar organisasi mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan. Dalam konteks pengelolaan UMKM, restrukturisasi organisasi tidak hanya bertujuan memperjelas struktur organisasi, tetapi juga meningkatkan sinergi antaraktor sehingga pengelolaan BUMDes dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember merupakan salah satu desa yang memiliki potensi wisata yang terus dikembangkan melalui Taman Wisata Desa Tanjungsari. Pengembangan kawasan wisata tersebut mendorong tumbuhnya berbagai UMKM masyarakat yang bergerak pada bidang kuliner, hasil olahan pertanian, serta produk lokal lainnya. Keberadaan UMKM tersebut diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus mendukung pengembangan wisata desa melalui pengelolaan yang terintegrasi oleh BUMDes.

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian di lapangan, pengelolaan UMKM di Taman Wisata Desa Tanjungsari masih menghadapi beberapa permasalahan. Organisasi pengelola UMKM belum memiliki struktur organisasi yang dibentuk secara formal sehingga pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antaraktor belum tersusun secara jelas. Koordinasi antara Pemerintah Desa,

BUMDes, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pelaku UMKM masih dilakukan secara informal berdasarkan kebutuhan di lapangan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan fungsi pengelolaan BUMDes belum berjalan secara optimal dalam mengoordinasikan pengembangan UMKM di kawasan wisata desa. Akibatnya, efektivitas pengelolaan BUMDes dalam mendukung pengembangan UMKM belum sepenuhnya tercapai.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan BUMDes tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan struktur organisasi, tetapi juga oleh hubungan antaraktor yang terlibat dalam proses pengelolaan UMKM. Pemerintah Desa, BUMDes, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pelaku UMKM memiliki peran, kepentingan, serta tingkat pengaruh yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program. Oleh karena itu, pendekatan analisis aktor digunakan untuk mengidentifikasi peran, kepentingan, pengaruh, dan hubungan antaraktor sehingga dapat diketahui bagaimana interaksi tersebut memengaruhi efektivitas pengelolaan BUMDes dalam mengembangkan UMKM di Taman Wisata Desa Tanjungsari.

Berbagai penelitian mengenai restrukturisasi organisasi telah banyak dilakukan, baik pada organisasi pemerintahan, organisasi perangkat daerah, maupun BUMDes. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada perubahan struktur organisasi atau aspek kelembagaan secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji restrukturisasi organisasi pengelola UMKM melalui pendekatan analisis aktor dalam kaitannya dengan efektivitas pengelolaan BUMDes di kawasan desa wisata masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengintegrasikan konsep restrukturisasi organisasi, analisis aktor, dan efektivitas pengelolaan BUMDes dalam konteks pengelolaan UMKM di kawasan wisata desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis restrukturisasi organisasi pengelola UMKM melalui pendekatan analisis aktor dalam mendukung efektivitas pengelolaan BUMDes di Taman Wisata Desa Tanjungsari, Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya mengenai restrukturisasi organisasi, analisis aktor, dan efektivitas pengelolaan BUMDes. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa Tanjungsari dan BUMDes dalam menyusun organisasi pengelola UMKM yang lebih efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Restrukturisasi Organisasi Pengelola UMKM melalui Analisis Aktor untuk Efektivitas Pengelolaan BUMDes di Taman Wisata Desa Tanjungsari, Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana Proses Restrukturisasi Organisasi Pengelola UMKM Melalui Analisis Aktor Untuk Efektivitas Pengelolaan BUMDES Di Taman Wisata Desa Tanjungsari, Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis restrukturisasi organisasi pengelola UMKM melalui analisis aktor dalam mendukung efektivitas pengelolaan BUMDes di Taman Wisata Desa Tanjungsari, Kabupaten Jember.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perlunya restrukturisasi organisasi pengelola UMKM guna mewujudkan efektivitas pengelolaan BUMDes di Taman Wisata Desa Tanjungsari, Kabupaten Jember

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian restrukturisasi organisasi, analisis aktor, dan tata kelola BUMDes dalam pengelolaan UMKM. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji efektivitas

pengelolaan BUMDes melalui pendekatan analisis aktor serta memperkaya literatur mengenai pengelolaan organisasi pada desa wisata.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi Pemerintah Desa Tanjungsari, BUMDes, dan para pelaku UMKM sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi serta menyusun pengelolaan organisasi yang lebih efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam memperjelas struktur organisasi, pembagian tugas, serta memperkuat koordinasi dan sinergi antaraktor yang terlibat dalam pengelolaan UMKM di Taman Wisata Desa Tanjungsari. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan efektivitas pengelolaan BUMDes sehingga mampu mendorong pengembangan UMKM dan keberlanjutan pengelolaan wisata desa. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian dalam penelitian mengenai restrukturisasi organisasi, analisis aktor, efektivitas pengelolaan BUMDes, serta pengembangan UMKM berbasis desa wisata.